

DAMPAK KEBIJAKAN PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENDAPATAN UKT MAHASISWA

(IMPACT OF THE POLICY OF THE COVID-19 PANDEMIC ON STUDENTS' UKT INCOME)

Budi Andriana¹, Aulia Farindianti², Mujayanah³, Puspo Anggono⁴, Eka Hendi Andriansyah⁵

Financial Department, Universitas Negeri Surabaya^{1,2,3,4,5}

budiandriana@unesa.ac.id¹, auliafarindianti@unesa.ac.id², mujayanah@unesa.ac.id²

, puspoanggono@unesa.ac.id⁴, ekaandriansyah@unesa.ac.id⁵

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:
03 Januari 2022

Tanggal Revisi:
21 Februari 2022

Tanggal Diterima:
8 Juni 2022

Publikasi On line:
02 Juli 2022

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of the UKT adjustment policy and its impact on the finances of higher education institutions. The study used descriptive approach with the use of primary data from student responses and secondary data from financial reports published by Unesa. The results of this study include the Higher Education Policy in terms of adjusting the UKT money for effective implementation. The student's response which has an impact on their mentality in the spirit of students continuing to carry out lectures and there will be no dropouts or late graduation in 2020. The policy has an effect on reducing the PNBP Income by 13%. However, the decrease in income was offset by a decrease in higher education operational costs as a form of efficiency that has been carried out by Unesa, which was 26%, so that the level of higher education financial deficit did not increase and did not interfere with higher education services to the academic community. The practical implication, the data for submissions from the previous semester is updated again so that the process of receiving aid is more selective and does not burden the agency's finances.

Key Words: Policy, UKT Income, Covid-19 Pandemic

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan kebijakan penyesuaian UKT dan bagaimana dampaknya terhadap keuangan Instansi Perguruan Tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan penggunaan data primer dari hasil respon mahasiswa dan sekunder dari laporan keuangan yang dipublish Unesa. Hasil penelitian ini antara lain Kebijakan Perguruan Tinggi dalam hal penyesuaian uang UKT efektif pelaksanaannya. Berdasarkan indicator keefektifan kebijakan dari empat indicator tepat kebijakan, tepat tepat pelaksanaannya, tepat target dan tepat lingkungan secara keseluruhan terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari respon mahasiswa yang berimbas pada mental mereka pada semangat mahasiswa tetap melaksanakan perkuliahan dan tidak terjadinya putus kuliah maupun keterlambatan kelulusan ditahun 2020. Kebijakan berpengaruh pada penurunan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) Universitas sebesar 13%. Namun penurunan pendapatan tersebut diimbangi dengan penurunan biaya operasional Perguruan Tinggi sebagai bentuk efisiensi yang telah dilakukan Unesa yaitu sebesar 26%, sehingga tingkat deficit keuangan perguruan tinggi tidak semakin tinggi dan tidak mengganggu pelayanan perguruan tinggi kepada civitas akademika. Implikasi praktisnya, agar kebijakan tepat sasaran perlu adanya seleksi secara berkala yang didasarkan pada tingkat kemampuan dan pekerjaan orang tua, data pengajuan semester sebelumnya diupdate kembali agar proses penerimaan bantuan lebih selektif dan tidak membebani keuangan Instansi.

Key Words: Kebijakan, Pendapatan UKT, Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 ini telah dimasukkan dalam permasalahan global dimana tingginya tingkat penularan covid-19 dan menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat (Susilo et al., 2020). Kebijakan pembatasan social masyarakat mau tidak mau harus dipatuhi oleh seluruh kalangan masyarakat. Keputusan ini berdampak pada kegiatan perekonomian seluruh negara didunia. Tak terkecuali dengan negara Indonesia, dampak ekonomi yang ditimbulkan merambat ke permasalahan di dunia pendidikan. Hal ini berimbas pada kemampuan tiap masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terkecuali dalam memenuhi kebutuhan untuk pendidikan keluarga mereka. Berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan menjadi sorotan masyarakat terutama pada tahun 2013 masyarakat sudah mulai gelisah akan adanya komersialisasi pendidikan khususnya Pendidikan Tinggi. Masyarakat merasa hanya mereka dari kalangan ekonomi menengah keatas yang dapat menikmati pendidikan tinggi. Atas dasar itulah pemerintah menyusun kebijakan beasiswa bidikmisi, kebijakan mahasiswa afirmasi yang semuanya dikemas dalam satu system pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia (Wiwoho, 2014). Reformasi Sistem Pembayaran Perguruan Tinggi, Kondisi Perekonomian Masyarakat dan Keputusan besaran Tarif Uang kuliah yang salah akan mempengaruhi tingkat putus sekolah bagi para siswanya (Bradley & Migali, 2019). Berdasarkan Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal, UKT merupakan sebgaiian Biaya Kuliah Tunggal (UKT) yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Penentuan kelompok UKT mempertimbangkan target prediksi penerimaan PNPB Universitas Negeri Surabaya, dan daya tampung mahasiswa baru. Kebijakan penentuan biaya kuliah suatu perguruan tinggi terkadang berbeda setia tahunnya khususnya untuk biaya kuliah jalur mandiri. Begitu pula Universitas Negeri Surabaya Unesa membuat kebijakan bahwa mahasiswa yang diterima dari jalur mandiri diharuskan membayar dua komponen biaya pendidikan yaitu Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi). Biaya kuliah mahasiswa Unesa jalur SNMPTN dan SBMPTN menggunakan UKT (Uang Kuliah Tunggal). Mahasiswa tidak dibebani biaya lagi selain UKT yang dibayarkan setiap semester. Pada prinsipnya UKT terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua atau pihak yang membiayai. Penentuan UKT bagi mahasiswa kelompok mengacu pada data atau dokumen pendukung yang harus di isi atau diupload secara online pada laman yang telah ditentukan. Khusus untuk mahasiswa jalur SPMB, beberapa Universitas telah menetapkan biaya standar UKT tertentu untuk mahasiswanya. Standar UKT ini biasanya besarnya mencakup biaya yang cukup tinggi bagi beberapa mahasiswa. Berbeda dengan jalur SNMPTN dan SMBPTN, besaran UKT bagi mahasiswa yang diterima dari jalur SPMB ditentukan minimal pada kelompok V (lima). Jadi ada 4 kelompok UKT yang dibebankan pendaftar jalur mandiri yakni kelompok V, VI, VII dan VIII. Selain itu mahasiswa jalur SPMB Universitas Negeri Surabaya Surabaya juga dibebankan dana SPI atau Sumbangan Pengembangan Insitusi dengan besaran bervariasi tergantung program studi yang dipilih. Setelah mahasiswa memperoleh UKT yang harus dibayarkan, mahasiswa wajib untuk membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan. Namun, dalam beberapa kasus ada mahasiswa yang masih keberatan untuk membayar UKT yang sudah ditentukan. Biasanya hal ini terjadi pada mahasiswa yang masuk ke Universitas Negeri Surabaya melalui jalur mandiri. Untuk hal tersebut di atas Universitas Negeri Surabaya memberikan waktu perpanjangan pembayaran UKT dan SPI dengan mengisi surat pernyataan kesanggupan membayar yang diunggah pada email: wr2@unesa.ac.id. Sedangkan pembayaran SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) dapat dibayar 3 kali dengan pola semester 1 (30%), semester 2 (30%) dan semester 3 (40%). Persepsi Mahasiswa beragam tentang Pembayaran kuliah dengan system Uang Kuliah Tunggal, beberapa penelitian sebelumnya sebelum masa pandemic menyebutkan Persepsi mahasiswa tentang Pembayaran melalui system UKT efektif dilakukan di perguruan tinggi dan penelitian kebijakan tersebut dipengaruhi oleh kebudayaan social dan gender. (Retnoningsih & Marom, 2017; Yanni, 2018), namun penelitian lain menjelaskan pada Proporsi sumber pendanaan dari masyarakat meningkat setelah kebijakan tersebut, sedangkan proporsi alokasi untuk biaya operasional menurun dan ditemukan pula kebijakan Uang Kuliah Tunggal Tidak berpengaruh pada Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan (Sumarno et al., 2017). Penerapan UKT diatas adalah pelaksanaan ketika masa sebelum pandemi Covid-19 datang ke Indonesia. Tentunya penerapan UKT di zaman sebelum pandemi haruslah berbeda dari saat pandemi. Sebabnya, pandemi covid menyebabkan banyak karyawan terkena PHK sehingga berpengaruh pada penghasilannya. Untuk mengatasi masalah tersebut Universitas Negeri Surabaya memiliki beberapa solusi yang ditawarkan kepada mahasiswa sehingga Rektor Universitas Negeri Surabaya membuat Surat Edaran mengenai aturan mengenai penetapan ulang Biaya Pendidikan/UKT karena dampak pandemic sebagai berikut: (1) Penyesuaian UKT (Penurunan karena dampak pandemi covid-19); (2) Penyesuaian penurunan sementara (karena dampak pandemi covid-19); (3) Pembebasan UKT Semester gasal 2020/2021 karena dampak Covid-19; (4) Penundaan UKT (karena dampak pandemi covid-19). Mahasiswa yang sudah tercatat di Universitas Negeri Surabaya dapat mengajukan penurunan UKT. Usulan Penurunan UKT diperuntukkan bagi mahasiwa baru SNMPTN dan SBMPTN dan hanya diberikan kesempatan 2 kali pada tahun pertama perkuliahan. Usulan tersebut harus dilengkapi dengan bukti/dokumen tambahan yang sah dan benar diluar dokumen yang sudah pernah diunggah di SIMREG pada saat registrasi mahasiswa baru yang belum pernah diupload. Kebijakan penurunan biaya pendidikan diharapkan dapat meningkatkan tingkat

kelulusan mahasiswa dan mengurangi keinginan mahasiswa untuk putus kuliah (Webber, 2017) disaat kesulitan perekonomian dimasa pandemi. Namun apakah kebijakan keringanan terkait pembiayaan pendidikan di masa pandemic dianggap efektif dan berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan pendidikan dimasa perekonomian masyarakat yang tidak stabil. Kebijakan penyesuaian UKT dapat menjadi satu upaya membantu mahasiswa dengan kondisi perekonomian yang terdampak Covid 19. Tapi perlu diperhatikan pula besaran penyesuaian dan prosesnya agar tetap tidak merugikan instansi dan kegiatan belajar mengajar serta administrasi instansi tetap berjalan dengan baik dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada civitas akademika. Rasio keuangan sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan public dalam suatu instansi, kemampuan menyediakan sarana dan prasarana serta infrastruktur dalam untuk kenyamanan customer sangat bergantung pada tingkat keuangan instansi (Puluhulawa, 2013) Atas dasar latar belakang tersebut penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan, mengevaluasi, dan menganalisa pendapatan UKT mahasiswa Diploma, Sarjana dan Terapan sebelum terjadi pandemi covid-19 dibandingkan dengan pendapatan UKT mahasiswa pada saat masa pandemi covid-19 di UNESA. Objek dalam penelitian ini adalah pendapatan UKT mahasiswa Diploma, Sarjana dan Terapan mulai dari proses pengusulan penyesuaian UKT dari tingkat fakultas, masa pembayaran UKT sampai dengan penyusunan laporan pendapatan UKT mahasiswa pada Universitas Negeri Surabaya.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

Covid-19 dan Dampak Ekonomi ke Masyarakat

Covid-19 adalah kepanjangan dari *corona virus disease* yang angka 19 nya berarti tahun ditemukannya Covid-19 adalah penyakit yang menular dan sedang dihadapi oleh seluruh dunia. Penyakit covid-19 ini telah dimasukkan dalam permasalahan global dimana tingginya tingkat penularan covid-19 dan menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat (Susilo et al., 2020).

Bahwa pandemi covid-19 ini, belum dapat diprediksi masa berakhirnya secara nasional sehingga dapat mempengaruhi jadwal pelaksanaan semester awal tahun 2020-2021. Atas pertimbangan bahwa, jika jadwal semester Genap 2019-2020 mengalami perpanjangan waktu, maka akan berpotensi menimbulkan konsekuensi penambahan biaya operasional perguruan tinggi, sementara penerimaan PNBPN selama ini mengalami penurunan. Untuk itu, jadwal pelaksanaan semester awal 2020-2021, agar tetap dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi yang diberlakukan selama ini dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu sesuai kebutuhan.

Dampak Ekonomi yang Diterima Masyarakat

Ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan ekonomi erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Manusia untuk memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal memerlukan keuangan yang cukup. Permasalahannya kegiatan ekonomi di masa pandemic ini tidak dapat berlangsung normal. Contohnya tempat pariwisata banyak yang ditutup. Kemudian ada pembatasan jam buka pada banyak toko sehingga menghambat waktu penjualan. Dilarangnya kerumunan di masyarakat juga membuat banyak usaha seperti bioskop dan tempat hiburan terpaksa tutup. Hal-hal diatas tentu sangat berdampak terhadap pendapatan masyarakat Indonesia yang notabene sangat bergantung pada hal tersebut. Berkurangnya pendapatan berjalan seiringnya dengan sedikitnya pengeluaran. Beberapa diantara masyarakat yang terdampak tersebut memiliki tanggungan atau kewajiban untuk membayar UKT. Pendapatan masyarakat yang sebelumnya jika dihitung cukup bahkan berlebih untuk membayar UKT yang ditanggung. Sekarang menjadi serba kekurangan. Hal ini banyak membuat mahasiswa tidak melanjutkan kuliah sementara untuk membantu orang tuanya bekerja atau terpaksa berhutang untuk membayar UKT. Dampak pandemi covid-19, tidak hanya kepada mahasiswa saja, tetapi juga kepada sivitas akademika lainnya termasuk dosen dan tenaga kependidikan, dan bahkan pada pengelolaan perguruan tinggi secara umum. Bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah di berbagai daerah, telah mengakibatkan sejumlah besar mahasiswa asal daerah lain untuk tetap bertahan di asrama dan tempat kos masing-masing, dan membutuhkan bantuan logistik untuk tetap bertahan hidup. Untuk itu, diinstruksikan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan pemantauan intensif guna memastikan keselamatan mereka dan keterpenuhan kebutuhan pangan dan sosial mereka selama bertahan di tempat masing-masing.

Kebijakan Uang Kuliah Tunggal Masa Pandemi Penyesuaian UKT mahasiswa

Pemerintah melalui Kemendikbud membuat keringanan Uang Kuliah Tunggal yang berlaku di perguruan tinggi negeri (PTN) (Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2020) dan Siaran Pers Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia No. 052/SP/MRPTNI/V/2020 tentang Kebijakan Perguruan Tinggi dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Selama Pandemi Covid-19. Dengan merujuk peraturan di atas Rektor Universitas Negeri Surabaya menetapkan mekanisme penyesuaian/perubahan ulang Biaya Pendidikan/UKT karena dampak pandemi covid-19 dapat di kelompokkan sebagai berikut (Mekanisme Penyesuaian/Perubahan Ulang Biaya Pendidikan/UKT, 2020) :

Tabel 1.
Persyaratan Pengajuan Penyesuaian UKT Berdasarkan Pengelompokan UKT

No	Uraian	Persyaratan umum	Keterangan
1	Penyesuaian UKT (Penurunan karena dampak pandemi covid-19)	Kondisi sosial ekonomi mengalami perubahan yang signifikan dari data sebelumnya antara lain: a. Orang tua/wali penanggung biaya kuliah meninggal dunia karena covid-19; b. Usaha orang tua/wali mengalami penurunan yang luar biasa/bangkrut akibat pandemi covid-19	Dokumen yang dilampirkan adalah: a. Akta kematian bagi orang tua/wali yang meninggal dunia; b. Keterangan dari asosiasi/pejabat yang berwenang bagi usaha yang bangkrut/penurunan luar biasa karena dampak covid-19
2	Penyesuaian penurunan sementara (karena dampak pandemi covid-19)	Adanya alasan dan bukti yang dapat diterima terkait dengan tingkat kemampuan ekonomi pada jangka waktu tertentu karena dampak pandemi covid-19	Surat keterangan dari asosiasi atau pejabat yang berwenang
3	Pembebasan UKT Semester gasal 2020/2021 karena dampak Covid-19	Diberikan kepada mahasiswa yang tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi terhenti pada semester genap 2019/2020, karena tidak dapat melakukan pengambilan data sebagai dampak pandemi covid-19, dan sudah tidak memprogram mata kuliah lain	Surat keterangan dari Pembimbing Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana, dan Surat pernyataan akan selesai pada semester gasal 2020/2021
4	Penundaan UKT (karena dampak pandemi covid-19)	Sampai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan, belum bisa membayar, sehingga penundaan pembayaran diberi jangka waktu tambahan 2 bulan.	Dokumen pengajuan dan surat pernyataan dari mahasiswa/orang tua/wali, surat keterangan dari pimpinan/pejabat yang berwenang

Sumber : Data Diolah 2020

Sedangkan Prosedur dan mekanisme proses pengajuan perubahan/penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT karena dampak pandemi covid-19 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Prosedur Pengajuan Penyesuaian UKT Berdasarkan Pengelompokan UKT

No	Uraian proses	Jangka waktu/target	Penanggungjawab/Koordinator
1	Mahasiswa/orang tua wali mengajukan surat ke Dekan/Direktur Program Pascasarjana dilampiri	2 (dua) minggu sebelum	Dekan/Wakil Dekan/Bidang Umum dan Keuangan, Direktur/Wakil Direktur Program Pascasarjana

	dengan data dukung yang relevan	berakhirnya masa pembayaran	
2	Verifikasi data dan pembahasan oleh tim verifikator	3-5 hari kerja	Tim Verifikator Fakultas/jurusan
3	Rekomendasi dan kesimpulan oleh tim verifikator kepada pimpinan Fakultas/Pascasarjana	2 hari kerja	Tim Verifikator Fakultas/jurusan
4	Pimpinan Fakultas/Pascasarjana membuat rekap dan meneruskan rekomendasi ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.	Secara periodik selambat-lambatnya 1 minggu sekali	Dekan/Wakil Dekan/Bidang Umum dan Keuangan, Direktur/Wakil Direktur Program Pascasarjana
5	Pemberian informasi kepada mahasiswa/orang tua wali atas hasil keputusan dari UNESA	2 hari kerja	Kepala BUK/Kabag Keuangan
6	Proses keuangan untuk pelaksanaan keputusan penyesuaian/perubahan Biaya Pendidikan/UKT	2-5 hari kerja	Kabag Keuangan dan PPTI

Sumber : Data Diolah 2020

Penerimaan Unesa melalui UKT setelah penyesuaian

Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh rektor tersebut, mempunyai dampak yang signifikan bagi penerimaan PNBPN Universitas Negeri Surabaya yang bersumber dari dana pendidikan Unesa tahun berjalan tahun 2020. Dimana prosentasi pendapatan Universitas Negeri Surabaya terbesar berasal dari pendapatan layanan pendidikan yaitu UKT dan SPI dari seluruh pendapatan yang diperoleh Universitas Negeri Surabaya. Adapun besarnya target pendapatan tahun 2019 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut (Mekanisme Penyesuaian/Perubahan Ulang Biaya Pendidikan/UKT, 2020) :

Tabel 3.
Target Pendapatan Jasa Layanan Umum 2019 dan 2020

Pendapatan Pendidikan	2020	2019	Kenaikan/penurunan
Target	258.315.320.000	232.217.929.000	26.097.391.000 11%

Sumber : Data Diolah 2020

Pada tahun 2020 terjadi kenaikan target Pendapatan sebesar 11%, kebijakan ini dibuat sebelum masa pandemic Covid 19. Perguruan Tinggi dapat meningkatkan saldo awal, yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan prioritas lembaga di tahun berikutnya.

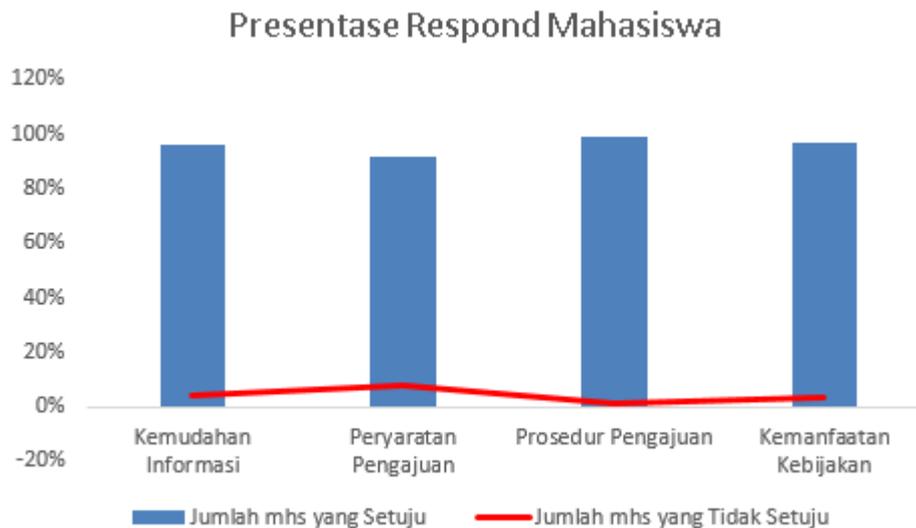
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang aktual, dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklarifikasinya, menganalisa dan menginterpretasikan. Lokasi penelitian adalah di Bagian Keuangan Pusat Universitas Negeri Surabaya. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif dan dengan penjelasan narasi. Populasi yang digunakan sebanyak total jumlah Mahasiswa yang mengajukan keringanan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Penyesuaian keringanan Uang Kuliah Tunggal masa Pandemi Covid 19 yaitu sebanyak 3.578 Mahasiswa Unesa. Sampel diambil menggunakan Random Sampling sebanyak minimal 60% dari total populasi yaitu minimal sebanyak 2.147 mahasiswa. Pengumpulan data menggunakan data yaitu diperoleh data primer dari responden melalui angket respons mahasiswa. Selain data primer juga digunakan data Sekunder yaitu penggunaan data tentang pendapatan UKT mahasiswa diploma, sarjana dan terapan yang didapatkan dari laporan keuangan.

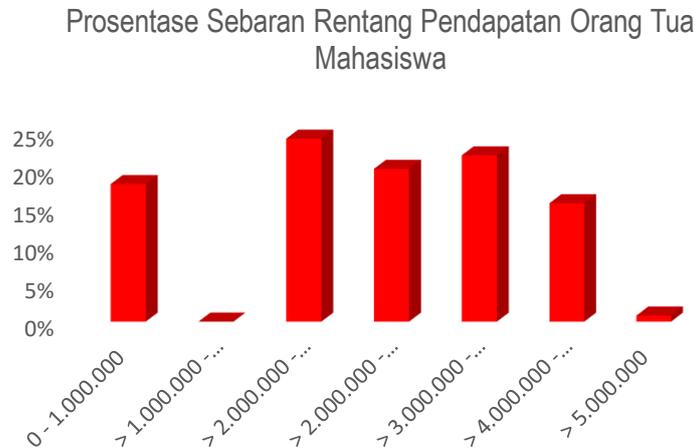
HASIL PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa data angket yang disebar kepada mahasiswa untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap efektifitas kebijakan penyesuaian

UKT dimasa Pandemi covid 19. Pada kuesioner terdapat 4 inti indicator yang ingin diketahui peneliti terkait respon siswa terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi antara lain Kemudahan Mahasiswa memperoleh informasi, Persyaratan pengajuan, prosedur pengajuan dan kebermanfaatan kebijakan. Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner didapatkan hasil tabulasi data sebagai berikut :



Gambar 1. Respon Mahasiswa Pada Kebijakan Penyesuaian UKT Masa Pandemi

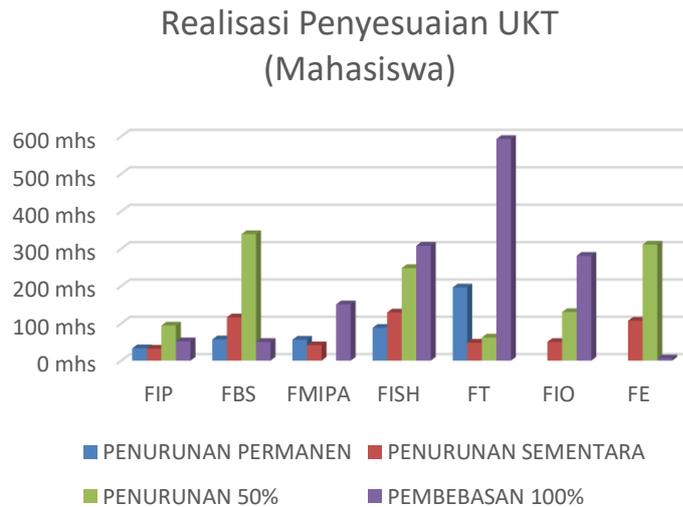


Gambar 2. Rentang Pendapatan Orang Mahasiswa Penyesuaian UKT

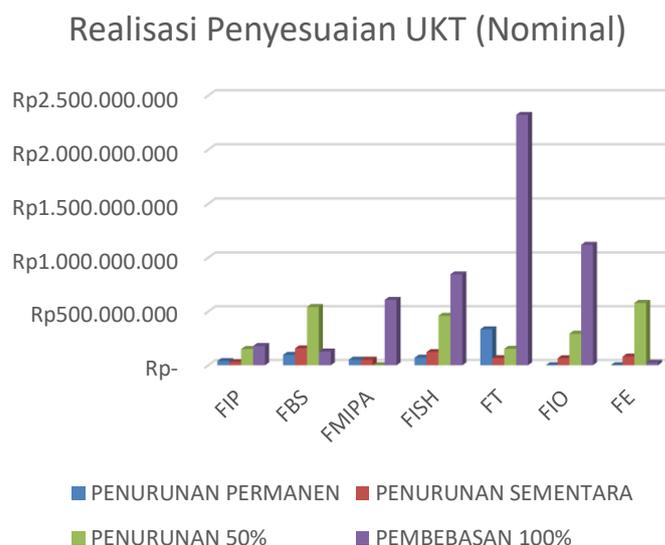
Pada Gambar 1 menggambarkan respon mahasiswa terkait kemudahan Mahasiswa memperoleh informasi, persyaratan pengajuan, prosedur pengajuan dan kebermanfaatan kebijakan. Pada point kemudahan mahasiswa memperoleh informasi terkait kebijakan penyesuaian Pembayaran UKT 100% mahasiswa seluruhnya sepakat mereka memperoleh kemudahan memperoleh informasi tersebut. Proses sosialisasi dilakukan melalui website Unesa dan social media lainnya, selain itu informasi disosialisasikan melalui kaprodi masing-masing dan melalui organisasi kemahasiswaan. Pada point kedua yaitu kemudahan persyaratan pengajuan 92% mahasiswa setuju proses persyaratan pengajuan penyesuaian UKT tidak memberatkan mereka. Point 3 terkait proses dan prosedur pengajuan penyesuaian UKT 99% mereka setuju prosedur berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan tidak menyulitkan mahasiswa dalam proses pengajuan penyesuaian UKT. Pada point terakhir yaitu kebermanfaatan kebijakan penyesuaian UKT, 100% mereka setuju dengan adanya kebijakan penyesuaian UKT

sangat membantu mereka menyelesaikan masalah pembayaran kuliah disaat perekonomian yang sulit dimasa pandemic Covid 19.

Pelaksanaan dan penerima kebijakan penyesuaian UKT dadpat dikatakan tepat sasaran, dapat dilihat dari gambar 2 yang menggambarkan mayoritas mahasiswa penerima manfaat kebijakan 62% dengan orang tua berpendapatan dibawah UMR atau dibawah 3 juta rupiah dan 18% diantaranya berpenghasilan tidak tetap atau dibawah 1 juta dan terkena pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaannya. Pada data Sekunder peneliti dapat memperoleh data tentang pengaruh kebijakan penyesuaian UKT terhadap Pendapatan Unesa. Pada tahap ini peneliti menggunakan data rekapitulasi penyesuaian UKT mahasiswa tahun 2020 dan laporan keuangan yang dipublish oleh Unesa melalui laporan keuangan. Berikut gambar yang menunjukkan hasil pengolahan data keuangan :



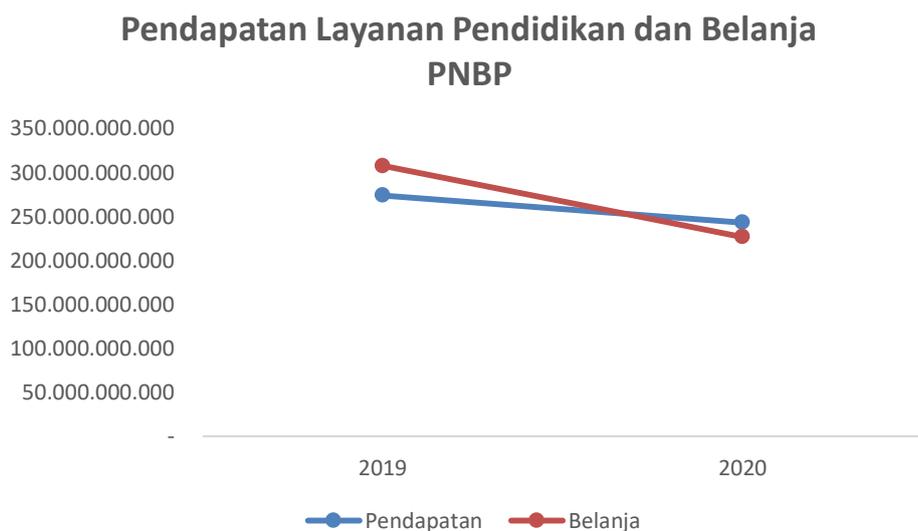
Gambar 3. Realisasi Penyesuaian UKT mahasiswa tahun 2020 (Mahasiswa)



Gambar 4. Realisasi Penyesuaian UKT Mahasiswa tahun 2020 (Nominal)

Pada Gambar 3 dan 4 menggambarkan realisasi dari pengajuan penyesuaian pembayaran UKT mahasiswa UNESA tahun 2020 dari sisi jumlah mahasiswa dan Total besaran nominal penyesuaian berdasarkan 4 Kategori penyesuaian UKT yaitu Penurunan Permanen, Penurunan 50%, penurunan sementara dan Pembebasan 100%

untuk tiap Fakultas di Unesa. Jumlah total mahasiswa penerima manfaat kebijakan penyesuaian UKT dimasa pandemic Covid 19 sebanyak 3.578 mahasiswa dengan jumlah penerima kategori penurunan permanen 430 mahasiswa, penurunan sementara 523 mahasiswa, penurunan 50% sebanyak 1.184 mahasiswa dan pembebasan 100% sebanyak 1.441 mahasiswa. Pada kategori tersebut terdapat catatan untuk kategori pembebasan 100% ditujukan bagi mahasiswa akhir yang telah memiliki SPK atau telah melewati semester akhir dan pada tahap proses menunggu kelulusan. Berikut data keuangan terkait pendapatan dan belanja Universitas Negeri Surabaya khusus Penerimaan dan belanja Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pendapatan Layanan Pendidikan dan Belanja Operasional).



Gambar 5. Perbandingan Realisasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan Belanja PNBP Tahun 2019 - 2020

Pada gambar grafik 5 yang ditunjukkan diatas menggambarkan perbandingan total pendapatan dan Belanja Unesa dari tahun 2019 (sebelum pandemic Covid 19) dan tahun 2020 (saat Pandemi Covid-19). Adanya kebijakan penyesuaian Pembayaran UKT dimasa pandemic menyumbang penurunan Pendapatan Unesa yang berasal dari Pendapatan layanan pendidikan (berasal dari biaya pendidikan). Penurunan pendapatan ditahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 13% yang diakibatkan dari penurunan pendapatan yang berasal dari uang pendidikan mahasiswa. Pada grafik perbandingan Realisasi Belanja Universitas tahun 2019 dan tahun 2020 dapat diketahui terjadi penurunan Belanja dari tahun 2019 ke tahun 2020, penurunan belanja tercatat sebesar 26%. Penurunan belanja ini terjadi karena adanya pengurangan aktivitas kegiatan mahasiswa secara offline. Selama pandemic Covid-19 civitasakademika mengurangi aktivitasnya secara tatap muka/offline baik mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan. Intensitas kegiatan dikampus yang berkurang menyumbang terjadinya penurunan belanja akibat dari penurunan aktivitas tersebut.

PEMBAHASAN

Efektifitas pelaksanaan surat keputusan rektor bagi mahasiswa yang terdampak pandemic.

Keluarnya Surat Keputusan Rektor terkait kebijakan penyesuaian UKT bagi mahasiswa berdampak covid 19 merupakan salah satu kebijakan rector atas kebijakan yang digulirkan pemerintahan pusat. Keefektifan adalah perbandingan antara hasil yang dilaksanakan secara nyata dengan hasil yang awalnya telah direncanakan. Sehingga suatu kebijakan dikatakan efektif dan berhasil apabila tercapai sesuai dengan tujuan yang sebelumnya telah direncanakan (Sulikhah, 2005). Pada penelitian ini menggunakan indicator penentuan efektifitas empat tepat yang terdiri dari tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target dan tepat lingkungan (Riant, 2011). Hasil analisis indicator efektifitas ditemukan indicator tepat kebijakan dengan indicator keberhasilan apakah kebijakan tersebut dirumuskan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan dan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (Riant, 2011). Keputusan penyesuaian pembayaran UTK mahasiswa ditujukan untuk meringankan beban mahasiswa dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran SPP dimasa pandemic covid dengan dampak permasalahan keuangan masyarakat Indonesia dan keputusan tersebut dikeluarkan oleh pihak yang

memiliki wewenang tertinggi Universitas yaitu Rektor melalui SK rektir Unesa. Tepat pelaksanaannya, maknanya pada kebijakan tersebut terdapat kerjasama atau kesepakatan antara beberapa pihak antara lain Universitas dengan pemerintah, dan universitas dengan masyarakat. Pada tahapan ini unsur tepat pelaksanaan memenuhi dimana surat keputusan rector tersebut dibuat berdasarkan Surat edaran dari pemerintah dan disepakati untuk mengatasi permasalahan dalam masyarakat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tepat target, maknanya apakah target yang diintervensi tepat sesuai rencana?siapkah kondisi target untuk diintervensi dan apakah intervensi bersifat baru dan mempengaruhi intervensi sebelumnya. Pada tahap ini tepat target memenuhi dengan target mahasiswa untuk mengatasi permasalahan keuangan mahasiswa yang sedang bermasalah akibat pandemic covid 19 sebagai aturan baru yang mampu mempengaruhi kebijakan yang lama yaitu besaran pembayaran UKT sebelumnya menjadi lebih kecil. Tepat lingkungan, maknanya memenuhi 2 lingkungan yaitu lingkungan kebijakan itu sendiri dan lingkungan eksternal kebijakan. Pada tahapan ini juga memenuhi, pada sisi lingkungan kebijakan telah dilaksanakan prosedur penyesuaian UKT tersebut dengan danya Panduan yang berisi syarat dan prosedur pengajuan penyesuaian dan tenaga pelaksana melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Sisi lingkungan eksternal individu pengaju penyesuaian UKT melaksanakan sesuai dengan aturan prosedur dan syarat yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga kegiatan penyesuaian UKT dapat terlaksana dengan lancar dan tepat sasaran. Atas dasar analisis indicator efektifitas tersebut dapat dinyatakan pelaksanaan kebijakan penyesuaian pembayaran UKT efektif dilakukan dimasa pandemic Covid 19.

Dampak pendapatan Universitas Negeri Surabaya ketika menerapkan surat rektor.

Surat rector tentang penyesuaian UKT dimasa pandemic berisi tentang penyesuaian UKT mulai dari penyesuaian UKT dengan penurunan pembayaran UKT mahasiswa sebesar 50%, penurunan sementara dan penurunan 100%. pada kebijakan tersebut akan berdampak pada penurunan pendapatan Universitas terutama pada sub pendapatan dari Jasa layanan Pendidikan. Pada hasil penelitian telah dijabarkan perbandingan pendapatan jasa layanan pendidikan pada tahun 2019 (sebelum pandemic) dengan pendapatan tahun 2020 (pasa saat pandemic) mengalami penurunan sebesar 13%. Kebijakan ini berdampak negative dengan menurunnya pendapatan layanan pendidikan. Unesa sebagai instansi pendidikan dengan status Badan Layanan Umum menerapkan penyusunan laporan laba rugi dengan memperhitungkan besaran pendapatan dan belanja instansi sama halnya dengan perusahaan nonprofit. Penelitian sebelumnya menyebutkan biaya operasional secara parsial berpengaruh negatif terhadap laba bersih perusahaan, penjualan secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap laba bersih sedangkan secara simultan biaya operasional dan penjualan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih (Saripah & Harahap, 2021). Pada Unesa dampak penurunan pendapatan tersebut tidak memiliki arti dibandingkan dengan dampak positif yang dihasilkan. Dampak positifnya antara lain tidak adanya mahasiswa yang putus kuliah, kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar dan tingkat keterlambatan kelulusan tidak meningkat. Pandemi covid-19 mengakibatkan kegoncangan pada perekonomian negara yang berpengaruh pada penurunan pendapatan perkappita, penurunan pendapatan perkatipa akan menurunkan konsumsi masyarakat (Hanum & Sarlia, 2019) atas dasar inilah Unesa mengeluarkan kebijakan penyesuaian UKT sengan mengambil resiko menurunnya pendapatan Universitas. Dampak negative penurunan pendapatan Unesa dirasa tidak menyumbang devisit keuangan universitas, hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian dimana penurunan pendapatan diikuti dengan penurunan pada belanja Universitas sebesar 23%. Besaran penurunan pendapatan dibandingkan penurunan biaya lebih besar penurunan jumlah belanja Universitas. Maknanya, universitas berhasil melakukan efisiensi belanja untuk mengatasi penurunan pendapatan akibat dari kebijakan penyesuaian UKT. Dapat dikatakan kebijakan penyesuaian UKT mempengaruhi turunnya jumlah pendapatan Unesa, namun penurunan tersebut dirasa tidak signifikan karena diikuti dengan penurunan belanja Unesa sebagai bentuk efisiensi yang telah dilakukan Universitas dalam mengatasi dampak negative penurunan UKT mahasiswa dimasa pandemic Covid 19. Kebijakan penurunan pengeluaran atau belanja tidak selamanya berdampak pada penurunan kualitas layanan public, diperlukan kebijakan selektif dengan focus anggaran pada kegiatan yang prioritas dan lebih ditujukan untuk kebutuhan public (Widodo, 2020).

SIMPULAN DAN SARAN

Perguruan tinggi mempunyai kebijakan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang diakibatkan kondisi pandemic Covid 19. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan beberapa kesimpulan terkait kebijakan yang diambil perguruan tinggi pada kondisi covid 19 antara lain : Kebijakan Perguruan Tinggi dalam hal penyesuaian uang UKT efektif pelaksanaannya. Berdasarkan indicator keefektifan

kebijakan dari empat indikator tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat target dan tepat lingkungan secara keseluruhan terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari respon mahasiswa yang berimbas pada mental mereka pada semangat mahasiswa tetap melaksanakan perkuliahan dan tidak terjadinya putus kuliah maupun keterlambatan kelulusan ditahun 2020. Kebijakan Perguruan Tinggi dalam hal penyesuaian uang UKT antara lain Penyesuaian UKT karena dampak pandemi covid-19 berpengaruh pada penurunan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) Universitas. Namun penurunan pendapatan tersebut diimbangi dengan penurunan biaya operasional Perguruan Tinggi sebagai bentuk efisiensi yang telah dilakukan Unesa, sehingga tingkat deficit keuangan perguruan tinggi tidak semakin tinggi dan tidak mengganggu pelayanan perguruan tinggi kepada civitas akademika. Implikasi praktisnya, agar kebijakan tepat sasaran perlu adanya seleksi secara berkala yang didasarkan pada tingkat kemampuan dan pekerjaan orang tua, data pengajuan semester sebelumnya diupdate kembali agar proses penerimaan bantuan lebih selektif dan tidak membebani keuangan Instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bradley, S., & Migali, G. (2019). The effects of the 2006 tuition fee reform and the Great Recession on university student dropout behaviour in the UK. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 164, 331–356. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.06.002>
- Hanum, N., & Sarlia, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Konsumsi Di Provinsi Aceh. *Samudra Ekonomika*, 3(1), 84–92.
- Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Budaya, Pub. L. No. 25 (2020).
- Puluhulawa, I. (2013). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap pelayanan publik pada kantor kas daerah propinsi sulawesi tengah. *E-Jurnal Katalogis*, 1(7), 14–28.
- Retnoningsih, Y. D., & Marom, A. (2017). Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Uang Kuliah Tunggal Bagi Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah. *Journal Of Public Policy And Management Review*, Volume 6(2), 1–15. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.16064>
- Riant, N. (2011). *Public Policy : Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan- Manajemen Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Saripah, E., & Harahap, M. N. (2021). Pengaruh Biaya Operasional Dan Penjualan Terhadap Laba Bersih Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 10(2), 143–157. <https://doi.org/10.34010/jika.v10i2.3448>
- Sulikhah, A. (2005). *Efektifitas Kebijakan Perlindungan Pekerjaan Anak (Child labour) dengan Focus Anak Jalanan di Surabaya*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga.
- Sumarno, S., Gimin, G., & Nas, S. (2017). Dampak Biaya Kuliah Tunggal Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 184. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p184-194>
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Mekanisme Penyesuaian/Perubahan Ulang Biaya Pendidikan/UKT, Pub. L. No. B/23831/UN38/TU.00.02/2020 (2020).
- Webber, D. A. (2017). State divestment and tuition at public institutions. *Economics of Education Review*, 60, 1–4. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2017.07.007>
- Widodo, S. (2020). Efisiensi & Efektivitas Belanja Pegawai, Barang & Modal. *Analisis Ringkas Cepat: Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, 4.
- Wiwoho, J. (2014). UKT: Ability To Pay Dalam Sistem Pembayaran Kuliah. <https://www.tribunnews.com/Kemendikbud/2014/12/03/Ukt-Ability-To-Pay-Dalam-Sistem-Pembayaran-Kuliah>, kelompok 1, 1–3.
- Yanni, R. P. (2018). Persepsi Mahasiswa PPKn Tentang Pelaksanaan dan Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Negeri Padang. *Journal of Civic Education*, 1(1), 27–34. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i1.6>